

HUBUNGAN KONDISI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DAN STATUS KEMISKINAN RUMAH TANGGA DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Anton Tri Wijayanto

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara

ARTICLE INFO

Keywords: financial incentives, non-financial incentives, work motivation, job satisfaction

Abstract: Many local governments carry out rehabilitation programs for uninhabitable houses with the aim of poverty alleviation. However, in implementation, sometimes those programs do not use the proper concept, definition and standard operating procedure. Moreover, the lack of understanding about the relationship between the two variables could reduce the effectiveness of those programs. This study aims to exercise the correlation between uninhabitable houses and household poverty statuses in Sulawesi Utara Province by using secondary data from the Socio-economic Household Survey (SUSENAS) conducted by BPS in 2020. The data provide information on 8,350 respondents spreading across all regencies/cities in Sulawesi Utara Province. Using Chi Square Correlation Test Analysis, the uninhabitable status of the household house was correlated with the poverty status of the household. The results of the study found that there is a significant positive correlation between the condition of uninhabitable houses and the poverty status of a household. However, the correlation is relatively quite weak. The government can use uninhabitable houses data as the basic data in the rehabilitation program for uninhabitable houses. But it is necessary to carry out deeper verification of households target so that the program can be right on target.

Kata Kunci: insentif finansial, insentif non finansial, motivasi kerja, kepuasan kerja

Corresponding author:

Anton Tri Wijayanto

antontw@bps.go.id

Abstrak: Banyak pemerintah daerah melakukan program rehabilitasi rumah tidak layak huni yang bertujuan mengentaskan kemiskinan. Namun dalam pelaksanaannya tidak disertai dengan konsep definisi serta standar operasional yang baku, bahkan tanpa mengetahui kelayakan korelasi antara kedua variabel tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara rumah tidak layak huni dengan status kemiskinan rumah tangga di Provinsi Sulawesi Utara. Menggunakan data sekunder hasil pendataan SUSENAS,BPS Tahun 2020 sebanyak 8.350 responden yang tersebar diseluruh Kabupaten/kota di Sulawesi Utara. Analisis Uji Korelasi Chi Square dilakukan terhadap variabel komposit status rumah tidak layak huni dengan variabel kemiskinan. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan meskipun bersifat sangat lemah antara kondisi rumah tidak layak huni dengan status kemiskinan suatu rumah tangga. Pemerintah bisa menggunakan data dasar RTLH ini dalam program rehabilitasi RTLH untuk pengentasan kemiskinan, namun perlu melakukan verifikasi lebih dalam terhadap calon rumah tangga penerima manfaat agar program dapat tepat sasaran.

LATAR BELAKANG

Seperti kita ketahui bersama, banyak pemerintah daerah melaksanakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk pengentasan kemiskinan. Penelitian – penelitian dan kajian tentang pengentasan kemiskinan melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) sudah

banyak dilakukan. Penelitian terdahulu tersebut diantaranya adalah Hikmawati (2016) yang menjelaskan bahwa program bedah rumah tidak layak huni di Kabupaten Kulonprogo telah terbukti berhasil menangani kemiskinan. Keberhasilan program ini tidak luput dari keseriusan pemerintah dalam melaksanakan program ini secara transparan. Adapun transparansi tersebut dilakukan dari awal, sejak dari proses pengajuan proposal, verifikasi data dan penetapan rumah tangga penerima program. Ismowati (2018) memaparkan hasil penelitian di Pandeglang tentang implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat miskin tidak berjalan dengan sempurna. Ketidaksempurnaan program tersebut diakibatkan oleh perencanaan program yang kurang matang dan terbatasnya anggaran yang tersedia. Penelitian Dahana (2019) menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan melalui perbaikan rumah tidak layak huni yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sragen sudah berjalan dengan baik dalam hal pencapaian kuantitas. Sedangkan dalam hal kualitas, masih perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut. Hal ini dikarenakan, penerima program bantuan hanya terbatas pada masyarakat yang mengajukan bantuan saja. Sehingga bisa memacu potensi *lack of coverage*. Sedangkan Nawi (2018) menjelaskan bahwa hasil dari program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji Kota Batu sudah dapat dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat program meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan kelemahan yang bersifat minor. Di lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Utara, hasil penelitian Asnawi (2020) di Kabupaten Minahasa Tenggara menunjukkan bahwa secara parsial, peningkatan bantuan RTLH pada rumah tangga tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin. Dengan kata lain, bantuan RTLH yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak merubah status kemiskinan suatu rumah tangga.

Penelitian – penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa sudah banyak pemerintah daerah yang melakukan program rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan. Namun, masih minim evaluasi empiris yang menunjukkan keberhasilan program rehabilitasi RTLH dalam pengentasan kemiskinan. Bahkan belum pernah ada penelitian yang membuktikan secara empiris bahwa rumah tidak layak huni berkorelasi dengan kemiskinan. Untuk itulah penelitian ini mengangkat tema ini supaya program pemerintah terkait rehabilitasi rumah tidak layak huni yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan tidak salah sasaran.

Rumah tidak layak huni adalah salah satu indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) bidang perumahan dan kawasan permukiman. Empat kategori pembentuk indikator komposit yang digunakan untuk menilai RTLH adalah kecukupan luas tempat tinggal minimal per kapita (*sufficient living space*), akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak dan ketahanan bangunan (*durable housing*).

Hipotesis penulis adalah terdapat korelasi antara rumah tidak layak huni dengan kemiskinan. Adapun batasan penelitian ini adalah batasan geografis wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan batasan periode penelitian adalah tahun 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara kondisi rumah tidak layak huni dengan status kemiskinan suatu rumah tangga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berguna kepada para pemangku kepentingan dalam melaksanakan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni untuk pengentasan kemiskinan dengan lebih terarah (*evidence based policy*).

LANDASAN TEORI

Kemiskinan

BPS mengukur kemiskinan menggunakan konsep pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Untuk itulah BPS mengukur kemiskinan dari sisi pengeluaran (dianggap lebih reliable dari sisi pendapatan) untuk pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga yang meliputi kebutuhan makan dan non makanan. Yang dikategorikan sebagai orang miskin adalah kelompok orang yang tingkat pengeluarannya dibawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan yang merupakan standar batas kemiskinan merupakan gabungan antara garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan makanan itu terbentuk dari total pengeluaran kebutuhan makan seseorang yang setara dengan konversi 2.100 kilokalori per kapita per hari. Sedangkan garis kemiskinan non makanan dibentuk dari total pengeluaran kebutuhan non makanan seseorang yang terdiri dari kebutuhan perumahan, sandang, pendidikan dan faktor kesehatan rumah tangga.

Sedangkan Bappenas menjelaskan kemiskinan sebagai situasi/kondisi seseorang atau kelompok orang, baik laki – laki maupun perempuan yang tidak mampu mewujudkan hak – hak dasar kehidupan yang bermartabat bagi dirinya maupun keluarganya. Hak-hak dasar tersebut adalah hak kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pertanahan, perumahan, air bersih, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan dan ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Menurut Meidiana (2019) kemiskinan merupakan suatu kondisi rumah tangga atau individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasarnya secara layak. Hal tersebut dapat terjadi karena ketimpangan hak akses atas kekuasaan sosial, sumber keuangan, aset, organisasi sosial politi, barang dan jasa keterampilan, pengetahuan dan sumber infomasi.

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Seiring dengan perkembangan definisi global tentang Rumah Tidak layak Huni yang berubah dari konsep *MDGs* ke *SDGs*, maka Badan Pusat Statistik juga merubah pola perhitungannya. Sejak tahun 2019, BPS menggunakan empat indikator dalam pola perhitungan Rumah Tidak Layak Huni. Keempat indikator tersebut adalah indikator kecukupan luas tempat tinggal, indikator akses terhadap air minum, indikator akses terhadap sanitasi yang layak dan indikator ketahanan bangunan.

Untuk indikator kecukupan luas tempat tinggal, BPS mengacu pada *sufficient living space* yakni $7,2 \text{ m}^2$ per kapita. Indikator akses terhadap air minum dilihat dari sumber air yang digunakan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan minumannya. Suatu rumah tangga dikatakan mendapatkan akses air minum yang layak apabila sumber air minumannya berasal dari leding meteran, leding eceran, keran umum, hidran umum, penampungan air hujan, sumur bor/pompa, sumur terlindung, serta mata air terlindung. Sedangkan rumah tangga yang menggunakan air kemasan dan/atau air isi ulang sebagai sumber air minumannya, dikategorikan memiliki akses air minum yang layak apabila sumber air untuk masak dan MCK-nya menggunakan sumber air minum terlindung. Indikator akses terhadap sanitasi yang layak dilihat dari tiga aspek yakni keberadaan fasilitas tempat buang air besar beserta orang yang menggunakannya, jenis kloset yang digunakan dan tempat pembuangan akhir tinja. Suatu rumah tangga dikatakan mempunyai fasilitas buang air besar yang layak bila mempunyai fasilitas buang air besar, dan fasilitas tersebut digunakan hanya oleh anggota rumah tangga tersebut dan/atau digunakan bersama anggota rumah tangga lain tertentu. Jenis kloset yang digunakan harus berjenis leher angsa, dengan tempat

pembuangan akhir tinja di tangki septik atau IPAL.

Indikator keempat dalam penentuan kategori Rumah Tidak Layak Huni adalah indikator ketahanan bangunan. Ketahanan bangunan dilihat dari jenis atap yang digunakan, bahan dinding rumah serta jenis lantai rumah. Suatu rumah dikategorikan sebagai rumah layak huni apabila atap rumah terluas terbuat dari genteng, kayu/sirap, dan seng. Sedangkan dinding harus terbuat dari tembok/GRC board, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan, atau batang kayu. Lantai rumah layak huni terbuat dari marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, atau semen/ bata merah.

Kategori rumah layak huni harus memenuhi keempat indikator tersebut tanpa terkecuali. Apabila ada salah satu indikator saja yang tidak terpenuhi, maka rumah tersebut akan dikategorikan sebagai rumah tidak layak huni (RTLH). RTLH inilah yang menjadi fokus dari penelitian ini.

Hipotesis Penelitian

Penelitian ini menggunakan hipotesis bahwa ada hubungan antara status Rumah Tidak Layak Huni dengan tingkat kemiskinan suatu rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian data numerik yang dihimpun melalui metode survey atau teknik penelitian lainnya. Metode penelitian ini sering digunakan oleh para peneliti karena relatif lebih efisien dalam penggunaan waktu dan biaya dalam pengorganisasian penelitian. Selain itu, dimasa sekarang ini makin dipermudah dengan penggunaan software statistik untuk menganalisis data (Parjaman, 2019).

Metode kuantitatif adalah penelitian yang berasal dari logika deduktif yang selanjutnya menggunakan teori untuk menurunkan hipotesis penelitian dengan pengukuran dan pengujian empiris secara statistik, supaya bisa diperoleh hasil penelitian yang diyakini kebenarannya. (Yoliana,2021).

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara dengan lokus penelitian di Provinsi Sulawesi Utara. Data yang digunakan adalah data *CrossSection* hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Maret 2020. Responden Survei ini sebanyak 8.350 responden yang tersebar diseluruh Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Pengambilan sampel survei menggunakan metode *Two Stage One Phase Stratified Sampling*.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel Kemiskinan dan Rumah Tidak Layak Huni. Variabel rumah tidak layak huni merupakan variabel komposit yang dibangun atas dasar 4 komponen pembentuknya yakni luas rumah, akses air minum layak, akses sanitasi layak dan ketahanan bangunan.

Untuk menganalisis hubungan variabel Rumah Tidak Layak Huni dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara, penelitian ini menggunakan metode analisis Chi Square dengan bentuk tabel 2x2. Analisis ini tidak memerlukan asumsi dan persyaratan khusus data harus berdistribusi normal. Namun begitu, analisis ini sudah memenuhi standar dasar yang diperlukan dalam analisis ChiSquare yakni ukuran sampel yang cukup besar (8.350 sampel), frekuensi harapan dari masing – masing cell tidak ada yang bernilai kurang dari 5 (frekuensi harapan terkecil 153), pemilihan sampel sudah dilakukan secara acak dengan metode *Two Stage One*

Phase Stratified Sampling, semua pengamatan sudah dilakukan secara independen, setiap sel yang ada dalam pengamatan hanya berisi satu frekuensi harapan,

Dasar pemikiran analisis korelasi Chi Square adalah perubahan antar variabel. Maksudnya, jika perubahan suatu variabel diikuti perubahan variabel yang lain maka kedua variabel tersebut saling berkorelasi. Dalam prakteknya, analisis chisquare ini merupakan salah satu alat analisis statistik yang paling sering digunakan (Wibowo,2017).

Rumus Model Uji Chi Square

$$\chi^2 = \sum (\text{Hasil yang diamati} - \text{Hasil yang diharapkan})^2 / \text{Hasil yang diharapkan}$$

$$\chi^2 = \sum ((O_i - E_i)^2 / E_i)$$

atau dalam text book yang lain, formula chi square dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\chi^2_c = \sum (F_0 - F_e)^2 / F_e$$

Keterangan:

- χ^2 = Nilai Chi Square
- c = degree of freedom (df/dk)
- $O_i = f$ = Frekuensi hasil yang diamati (*observed value*)
- $E_i = f_e$ = Frekuensi yang diharapkan (*expected value*)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengolahan data, didapatkan cross tabulasi untuk 8.350 responden dengan variabel status rumah layak huni/tidak layak huni dengan status kemiskinan rumah tangga (miskin/tidak miskin) sebagai berikut :

Tabel 1. Tabulasi Silang Status Kemiskinan dan Status Rumah_Layak

		Rumah_Layak_Huni		Total
		Layak	Tidak Layak	
Status Kemiskinan	Tidak	Count	5593	2270
	Miskin	Expected Count	5386.4	2476.6
	Miskin	Count	209	278
Total		Expected Count	333.6	153.4
		Count	5802	2548
		Expected Count	5802.0	2548.0
				8350

Tabel 2. Hasil uji signifikansi Chi Square

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	177.722 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	176.384	1	.000		
N of Valid Cases	8350				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 153.39.

b. Computed only for a 2x2 table

Berdasarkan Tabel 2 hasil olah data diketahui bahwa nilai asymp.sig (2-sided) pada uji Pearson Chi_Square adalah sebesar 0.000. Karena nilai asymp.sig (2-sided) $0.000 < 0.05$, maka berdasarkan dasar pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian dapat diartikan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara status rumah tidak layak huni dengan status kemiskinan suatu rumah tangga.

Dalam tabel output ChiSquare test tersebut terdapat keterangan “*0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 153.39*” yang berarti bahwa asumsi penggunaan uji chisquare dalam penelitian ini sudah memenuhi syarat. Sebab tidak ada sel yang memiliki frekuensi harapan dibawah 5, dan frekuensi harapan terendah adalah 153.39.

Tabel 3. Tabel korelasi antara Status Kemiskinan dan Status Rumah_Layak

		Value	Asymptotic Standard Error ^a	Approximate T ^b	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.144			.000
N of Valid Cases		8350			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.

Berdasarkan Tabel 3 hasil olah data diketahui bahwa nilai korelasi *contingency coefficient* sebesar 0.144 (14.4 %). Sugiyono (2017) menginterpretasikan koefisien korelasi menjadi lima kelompok tingkat hubungan yakni sangat rendah dengan nilai 0,00 – 0,199, rendah dengan nilai 0,20 – 0,399, sedang dengan nilai 0,40 – 0,599, kuat dengan nilai 0,60 – 0,799, sangat kuat dengan nilai 0,80 – 1. Dengan demikian dapat diartikan bahwa hubungan positif antara status rumah tidak layak huni dengan status kemiskinan suatu rumah tangga bersifat sangat rendah.

Tabel 4. Persentase rumah tidak layak huni dan tingkat kemiskinan menurut Kabupaten/kota di Sulawesi Utara,2020

	Layak	Tidak Layak	Total	% RTLH	% miskin	Korelasi
Bolaang Mongondow	377	227	604	37,58	7,27	0,131
Minahasa	498	162	660	24,55	7,30	0,065
Kepulauan Sangihe	383	186	569	32,69	11,14	0,214
Kepulauan Talaud	349	196	545	35,96	9,49	0,100
Minahasa Selatan	414	137	551	24,86	9,14	0,134
Minahasa Utara	448	108	556	19,42	7,00	0,119
Bolaang Mongondow Utara	257	212	469	45,20	8,41	0,134
Siau Tagulandang Biaro	466	67	533	12,57	8,94	0,094
Minahasa Tenggara	371	120	491	24,44	12,3	0,207
Bolaang Mongondow Selatan	267	264	531	49,72	12,77	0,146
Bolaang Mongondow Timur	275	261	536	48,69	5,88	0,140
Kota Manado	482	161	643	25,04	5,86	0,120
Kota Bitung	418	133	551	24,14	6,41	0,182
Kota Tomohon	392	167	559	29,87	5,60	0,123
Kota Kotamobagu	405	147	552	26,63	5,42	0,171
Sulawesi Utara	5802	2548	8350	30,52	7,62	0,144

Tabel 5. Persentase rumah tidak layak huni dan tingkat kemiskinan menurut Tipe Daerah di Sulawesi Utara,2020

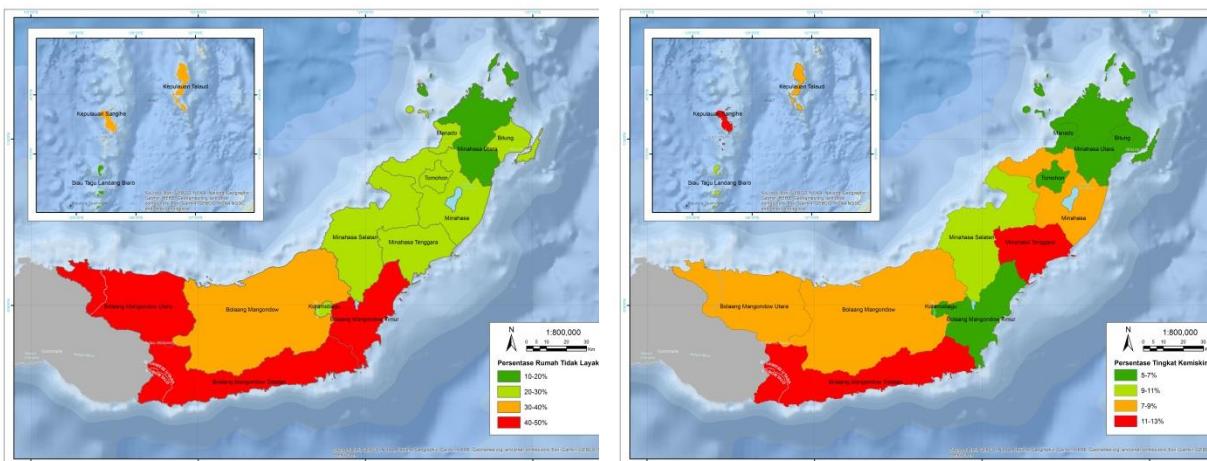
	Layak	Tidak Layak	Total	% RTLH	Korelasi
Kabupaten	4105	1940	6045	32,09	0,132
Kota	1697	608	2305	26,38	0,151
Sulawesi Utara	5802	2548	8350	30,52	0,144

Pembahasan

Sulawesi Utara telah berhasil meningkatkan persentase RLH di tahun 2020 sebesar 69,48 persen dari tahun sebelumnya 2019 sebesar 64,61 persen. Keberhasilan meningkatkan persentase RLH ini juga diikuti dengan naiknya peringkat Sulawesi Utara dari peringkat 7 di tahun 2019 menjadi peringkat 4 di tahun 2020 dalam hal capaian persentase RLH. Adapun tiga peringkat terbesar persentase RLH di Indonesia adalah Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Bali dan Provinsi Kalimantan Timur.

Tiga dari empat indikator pembentuk RLH juga meningkat dari tahun 2019 ke tahun 2020. Indikator kecukupan luas tempat tinggal meningkat dari 89,52 persen di tahun 2019 menjadi 91,53 persen di tahun 2020. Indikator Sanitasi yang layak meningkat dari 82,36 persen di tahun 2019 menjadi 85,49 persen di tahun 2020. Indikator ketahanan bangunan meningkat dari 90,18 persen di tahun 2019 menjadi 92,88 persen di tahun 2020. Hanya indikator air minum yang layak saja yang mengalami penurunan dari 90,81 persen di tahun 2019 menjadi 90,31 persen di tahun 2020.

Tentunya indikator kemudahan akses air minum yang layak ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Kesulitan dalam mengakses air bersih dan aman tentunya akan menambah beban yang berat bagi masyarakat miskin (Suryani,2019)



Gambar 1. Peta Tematik Persentase Rumah Tidak Layak Huni dan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2020

Bila dilihat menurut sebaran wilayah Kabupaten kota di Sulawesi Utara, Bolaang Mongondow Raya menempati posisi tertinggi dalam hal persentase RTLH. Adapun Kabupaten tersebut adalah Bolaang Mongondow Selatan sebesar 49,72 persen, Bolaang Mongondow Timur sebesar 48,69 persen, Bolaang Mongondow Utara sebesar 45,20 persen dan Bolaang Mongondow sebesar 37,58 persen. Sedangkan daerah dengan persentase RTLH terkecil adalah Siau Tagulandang Biaro.

Adapun daerah perkotaan, persentase RTLH nya relatif kecil, dengan nilai dibawah 30 persen. Kota Bitung merupakan wilayah perkotaan di Sulawesi Utara yang memiliki persentase RTLH yang terendah, yakni sebesar 24,14 persen. Kota Manado sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Utara memiliki persentase RTLH yang tidak jauh berbeda dengan Kota Bitung yakni sebesar 24,14 persen. Kota Kotamobagu sebesar 30,52 persen. Dan Kota Tomohon merupakan wilayah perkotaan d Sulawesi Utara dengan angka RTLH tertinggi yakni 29,87 persen.

Sedangkan daerah Kabupaten yang belum disebutkan diatas, mempunyai persentase RTLH yang tidak jauh berbeda dengan persentase RTLH daerah perkotaan yakni dibawah 30 persen. Kabupaten tersebut adalah Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Utara dan Minahasa Tenggara.

Bila dilihat tata letak geografinya, terlihat ada dua pengelompokan wilayah dengan persentase RTLH diatas 30 persen dan dibawah 30 persen. Daerah perkotaan dan Kabupaten yang berdekatan dengan daerah perkotaan mempunyai persentase RTLH dibawah 30 persen. Sedangkan daerah yang jauh dari perkotaan dan jauh dari ibukota provinsi (Manado) mempunyai persentase RTLH diatas 30 persen.

Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara terus pengalami penurunan dari tahun ke tahun. Angka kemiskinan pada tahun 2016 mencapai 8,34 persen, terus mengalami penurunan sampai tahun 2020 sebesar 7,62 persen. Secara spasial, empat daerah di perkotaan mempunyai angka kemiskinan yang relatif rendah dibandingkan Kabupaten lainnya. Adapun angka kemiskinan di daerah perkotaan tersebut berkisar di angka 5 – 6 persen. Sedangkan daerah Kabupaten (kecuali Bolaang Mongondow Timur) mempunyai angka kemiskinan yang cukup tinggi, diatas 7 persen. Bahkan ada tiga Kabupaten yang mempunyai angka kemiskinan diatas 10 persen yakni Kepulauan Sangihe, Minahasa Tenggara dan Bolaang Mongondow Selatan.

Jadi, secara deskriptif dalam tabel 4 dan tabel 5 dapat kita lihat bahwa ada korelasi positif antara RTLH dengan tingkat kemiskinan. Daerah Kabupaten mempunyai persentase RTLH yang lebih tinggi daripada daerah kota. Hal ini searah dengan data kemiskinan dimana pada umumnya tingkat kemiskinan di Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan di kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Selain melalui analisis tabel, gambaran deskriptif tentang korelasi antara RTLH dengan kemiskinan dapat kita lihat juga melalui peta tematik. Octaria (2017) menyatakan bahwa pembuatan peta tematik merupakan satu diantara cara yang paling efektif dan efisien untuk menganalisa dan memvisualkan data dan informasi yang lebih menarik dan informatif. Karena data yang ditampilkan dalam bentuk peta, akan sangat mudah untuk dibaca dan dipahami oleh pemerintah daerah dalam mengambil sebuah keputusan. Selain itu, untuk mendukung penelitian tentang upaya pencegahan demam berdarah dengue di Kecamatan Rappocini, Wulandani (2018) juga menggunakan bahwa metode deskriptif peta tematik dapat digunakan untuk memudahkan mengetahui penyebaran penyakit DBD sehingga membantu dalam proses analisa serta pengambilan keputusan terkait pencegahan penyebaran penyakit berdasarkan wilayah penyebarannya. Sehingga upaya pencegahan yang bersifat khusus antar wilayah dapat segera diputuskan. Begitu juga dengan penelitian ini, menggunakan peta tematik sebagai salah satu alat untuk menganalisa korelasi antara RTLH dengan kemiskinan. Seperti tampak pada gambar 1 diatas, dapat dilihat bahwa konsentrasi RTLH terpusat di daerah selatan Sulawesi Utara. Hal senada terjadi pada variabel kemiskinan dimana daerah selatan menjadi pusat konsentrasi kemiskinan. Sedangkan daerah utara, selain rendah persentase RTLH nya, kemiskinan juga relatif rendah. Tampak pada gambar 1 tersebut bahwa di wilayah utara provinsi Sulawesi Utara, hanya Kabupaten Minahasa Tenggara yang masuk dalam kategori “merah” kemiskinan. Peta tematik ini menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara RTLH dengan tingkat kemiskinan.

Secara inferensia, analisis korelasi ChiSquare dilakukan untuk melihat seberapa erat hubungan status RTLH terhadap kemiskinan suatu rumah tangga. Setelah dilakukan pengolahan data, hasilnya dapat dilihat pada tabel 2, tabel 3, tabel 4 dan tabel 5.

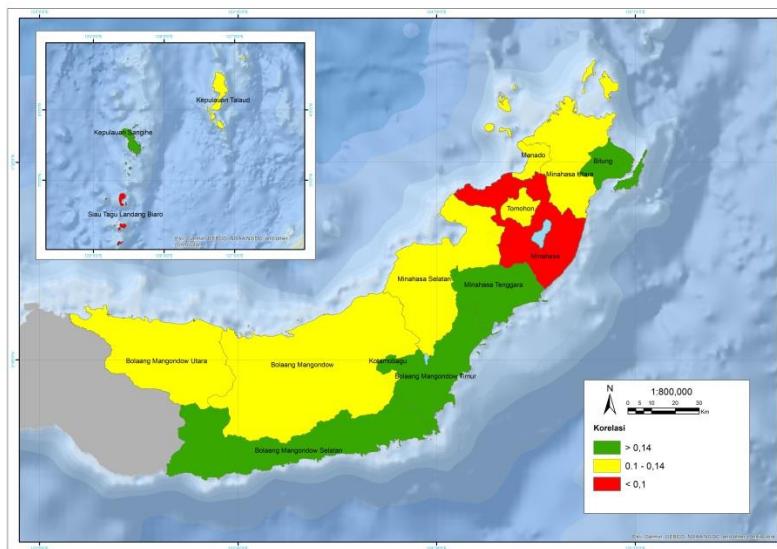
Angka 0,144 menunjukkan besaran koefisien korelasi antara RTLH dengan variabel kemiskinan yang bersifat positif. Hal ini berarti ada korelasi searah antara RTLH dengan variabel kemiskinan, semakin tidak layak kondisi rumah suatu rumah tangga maka akan semakin mendekati ke status kemiskinan.

Namun korelasi antara kedua variabel ini bersifat sangat rendah. Korelasi yang bersifat sangat rendah ini bisa ditolerir karena pengukuran kemiskinan yang dilakukan oleh BPS dilakukan melalui pendekatan pengeluaran, bukan pendekatan bangunan atau fasilitas perumahan rumah tangga. Terkait korelasi yang bersifat searah namun dengan kekuatan korelasi yang sangat rendah ini perlu mendapat perhatian yang sangat serius bagi para pengambil kebijakan. Konsumen pengguna data yang akan merumuskan kebijakan program pemerintah dengan menggunakan dasar data ini perlu memperdalam data ini. Hal ini berarti program – program revitalisasi RTLH untuk pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh banyak pemerintah daerah perlu dilakukan secara selektif. Program revitalisasi RTLH tidak hanya melihat pada data RTLH saja, namun perlu diberikan variabel pendamping non perumahan untuk menentukan kelayakan target penerima program revitalisasi RTLH.

Besaran koefisien korelasi antara RTLH dengan variabel kemiskinan yang bersifat positif ini juga bisa kita lihat dalam analisis spasial per Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Dimana dalam analisis spasial ini, semua Kabupaten/kota menunjukkan hubungan searah dalam korelasi antara RTLH dengan variabel kemiskinan (tabel 4). Hal ini berarti bahwa setiap

Kabupaten/kota di Sulawesi Utara berlaku teori yang sama yakni semakin tidak layak kondisi rumah suatu rumah tangga maka akan semakin mendekati ke status kemiskinan.

Penulis membagi kabupaten/kota di Sulawesi Utara menjadi tiga kelompok berdasarkan nilai korelasi antara RTLH dengan kemiskinan. Seperti ditampilkan pada gambar 2, secara geografis, daerah di wilayah selatan mempunyai tingkat korelasi yang lebih besar. Daerah tersebut adalah Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Kotamobagu dan Bitung. Bahkan secara umum korelasi kabupaten/kota diatas 0,1. Hanya Minahasa dan Sitaro yang memiliki nilai korelasi dibawah 0,1. Tingkat korelasi ini bisa digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk menentukan skala prioritas pelaksanaan program rehabilitasi RTLH. Semakin tinggi korelasinya, dapat menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program rehabilitasi RTLH. Dilain pihak, korelasi yang sangat rendah, bisa juga tetap dilaksanakan program rehabilitasi RTLH dengan proses seleksi dan verifikasi yang ketat.



Gambar 2. Peta Tematik Korelasi Rumah Tidak Layak Huni dan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2020

Perlakuan selektif dalam verifikasi tersebut bisa dilakukan dengan menambahkan variabel pendamping dalam proses seleksi calon penerima program. Perlakuan selektif juga bersifat *unique* berdasarkan hasil analisis korelasi per Kabupaten/kota. Penulis membagi perlakuan selektif tersebut dibagi menjadi selektif berat, sedang dan ringan. Wilayah yang perlu selektif berat, yakni wilayah yang mempunyai nilai korelasi dibawah 0,1 yakni Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Kategori kedua adalah wilayah yang perlu selektif tingkat sedang, yakni wilayah yang mempunyai nilai korelasi antara 0,1 sampai dengan 0,14. Terdapat 8 wilayah yang masuk dalam kategori kedua ini. Kategori ketiga adalah wilayah yang perlu selektif ringan, yakni wilayah yang mempunyai nilai korelasi diatas nilai korelasi provinsi 0,14. Terdapat lima wilayah yang masuk dalam kategori ini. Perbedaan tingkat selektif ini sebagai tanda awas bagi pemerintah daerah di Kabupaten/kota yang akan melakukan program revitalisasi RTLH untuk pengentasan kemiskinan dengan menggunakan data dasar RTLH.

Hal ini senada dengan penelitian Irfan (2016) yang menyatakan bahwa kebijakan program rumah layak huni yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru belum berjalan secara efektif karena sasaran penerima program rumah layak huni tidak terverifikasi dengan sempurna. Tursilarini (2020) yang melakukan penelitian tentang dampak bantuan RTLH untuk meningkatkan

kesejahteraan sosial rumah tangga sasaran juga menyatakan bahwa program ini perlu campur tangan stakeholder terkait dalam melakukan verifikasi data rumah tangga penerima manfaat. Selain itu, Noh (2018) telah melakukan penelitian untuk melakukan verifikasi lebih lanjut tentang penerima bantuan program Rumah layak huni dengan menggunakan metode profile matching.

Adapun data pelengkap lainnya yang bisa digunakan sebagai filter verifikasi kepada calon rumah tangga penerima manfaat program rehabilitasi RTLH adalah pendidikan kepala keluarga, jenis pekerjaan kepala keluarga, jumlah tanggungan keluarga maupun kepemilikan aset lainnya sebagai *visible data* yang mudah untuk diverifikasi (suryani,2019)

Sedangkan tingkat signifikansi korelasi antara RTLH dengan kemiskinan itu berarti atau tidak, perlu dilakukan pengujian signifikansi dengan melihat tingkat signifikansi. Seperti terlihat pada tabel 2, tingkat signifikansi dengan nilai 0,000 yang kurang dari 0,05 menunjukkan terdapat hubungan yang berarti antara RTLH dengan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara RTLH dengan kemiskinan adalah signifikan. Hasil penelitian ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Puteri (2016) yang menyatakan karakteristik fisik rumah berpengaruh terhadap kemiskinan. Selain itu, Meidiana (2019) juga menyatakan bahwa kepemilikan aset rumah serta ketersediaan infrastruktur berpengaruh terhadap kemiskinan suatu rumah tangga. Abbas (2015) dalam penelitiannya di Kalimantan Timur juga menyebutkan bahwa penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin telah dapat dikatakan berhasil dalam mengangkat derajat rumah tangga miskin.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang searah antara status rumah tidak layak huni dengan status kemiskinan suatu rumah tangga. Meskipun tingkat korelasinya termasuk dalam kategori korelasi yang sangat rendah namun korelasi antara kedua variabel ini signifikan. Sehingga korelasi yang bersifat searah dan signifikan ini bisa digunakan oleh para pemangku kebijakan untuk digunakan sebagai data dasar dalam merumuskan kebijakan – kebijakan pengentasan kemiskinan melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Data RTLH sebagai data dasar program rehabilitasi RTLH untuk pengentasan kemiskinan tentunya sangat kuat dalam memetakan rumah tangga penerima manfaat, namun masih diperlukan verifikasi rumah tangga secara mendalam supaya program tepat sasaran.

Secara spatial, wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Raya bisa mendapatkan prioritas pelaksanaan program rehabilitasi RTLH di Sulawesi Utara.

Saran

Koordinasi berbagai stakeholder terkait di Provinsi Sulawesi Utara dalam hal pelaksanaan program revitalisasi RTLH untuk pengentasan kemiskinan masih perlu ditingkatkan, salah satu caranya adalah pemanfaatan program satu data Indonesia.

Program rehabilitasi RTLH dapat dijadikan sebagai salah satu bagian program yang tak terpisahkan dari keseluruhan program pemerintah Sulawesi Utara untuk mengentaskan kemiskinan.

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang *visible data* yang bisa digunakan oleh para

pemangku kebijakan dalam merumuskan operasional lapangan program rumah layak huni.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas (2015), Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
- Asnawi, Kindangen, Engka (2020), Pengaruh Pendidikan, Program Keluarga Harapan dan Program Rumah Tinggal Layak Huni Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara
- Dahana (2019), Kinerja Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) Dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Slragen.
- Hikmawati, G. (2016), Bedah Rumah sebagai Bentuk Pengentasan Kemiskinan, Kulonprogo
- Irfan (2017), Kebijakan Rumah Layak Huni Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Mengataasi Kemiskinan Tahun 2016, Riau
- Ismowati, S. (2018), Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Pandeglang, Pandeglang
- Meidiana (2019), Pengaruh Kepemilikan Aset, Ketersediaan Infrastruktur, dan Pendidikan Terhadap Pendapatan dan Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin
- Mojambo, G. A., Tulung, J. E., & Saerang, R. T. (2020). The Influence of Top Management Team (TMT) Characteristics Toward Indonesian Banks Financial Performance During the Digital Era (2014-2018). *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 7(1).
- Nawi, Lestari (2018), Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu
- Octaria, Daniati, Maimun, Zulhendry (2019), Pembuatan Peta Tematik Penyebaran Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) Berdasarkan Letak Wilayah Kerja di Provinsi Riau Tahun 2017, Riau
- Puteri, Notobroto (2016), Indikator Karakteristik Fisik Rumah Dominan dalam Penentuan Status Kemiskinan untuk Program Rehap Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sidoarjo
- Roebyantho, U. (2012), Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Di Kota Garut, Jawa Barat,
- Silaban, D., Jaunanda, M., & Ferdinand, F. (2020). Perceived Risk and Intention To Purchase

From Overseas Sellers In Shopee: Jabodetabek Consumer Perspective. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 7(2).

Sugiyono (2017), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Bandung

Suryani, Permadi, Sarifudin (2019), Identifikasi Karakteristik dan Profil Kemiskinan di Pulau Lombok : Basis Perumusan Intervensi Kebijakan

Wibowo (2017), Uji Chi-Square Pada Statistika dan SPSS

Wulandhani, Purnamasari, Pratomo (2018), Upaya Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue dalam Bentuk Peta Tematik di Kecamatan Rappocini, Makasar

Yoliana, Murni, Tulung (2021), Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Berbasis Tingkat Struktur Modal Pada Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di BEI